UNIVERSITAS GADJAH MADA
Implementasi Asas Keadilan dan Kesepakatan dalam Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Seksi III B)
Adinda Putri Ramadhanty, Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN DAN KESEPAKATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Seksi III B)

Oleh: Adinda Putri Ramadhanty[1] dan Rafael Edy Bosko[2]

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari asas keadilan dan kesepakatan pada pelaksanaan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Seksi III B juga mengetahui dan menganalisis kendala dalam mewujudkan asas keadilan dan kesepakatan dalam pelaksanaan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Seksi III B.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang terlibat dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Seksi III B. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Seksi III B berhasil menetapkan baik bentuk maupun besaran nilai ganti kerugian berdasarkan kesepakatan bersama dengan memberikan kesempatan bagi pihak yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, keberatan ataupun penolakan dari besaran nominal ganti kerugian yang dihasilkan oleh Penilai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ganti kerugian disepakati berupa uang untuk tanah milik individu/perseorangan serta tanah pengganti untuk tanah milik Instansi Pemerintah, tanah Yayasan dan tanah Wakaf. Terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan asas keadilan dan kesepakatan, terutama ketiadaan parameter berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat mengenai ganti kerugian yang bersifat "layak" dan "adil". Kendala lainnya termasuk dalam hal inventarisasi data, perencanaan, keterlibatan masyarakat, serta kendala mengenai informasi antar pihak terkait.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Keadilan, Kesepakatan, Ganti Kerugian, Musyawarah, Pembangunan Jalan Tol

---

[1] Penulis, Mahasiswa Konsentrasi Hukum Agraria, Program Studi Sarjana Strata-1 (S-1) Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[2] Pembimbing, Dosen Departemen Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Implementasi Asas Keadilan dan Kesepakatan dalam Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Seksi III B)
Adinda Putri Ramadhanty, Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

THE IMPLEMENTATION OF JUSTICE AND CONSENSUS PRINCIPLES IN THE COMPENSATION PROCESS FOR LAND ACQUISITION IN FABOR OF PUBLIC INTEREST
(Case Study of The Bogor Outer Ring Road Section III B Toll Road Construction)

By: Adinda Putri Ramadhanty[1] and Rafael Edy Bosko[2]

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the implementation of justice and consensus principles in the deliberation process for the Determination of Compensation in Land Acquisition for the Bogor Outer Ring Road Toll Road Section III B, as well as to identify and analyze the obstacles in realizing these principles during the Determination of Compensation process in Land Acquisition for the Bogor Outer Ring Road Toll Road Section III B.

This research is a normative-empirical legal study, which combines literature research to obtain secondary data and field research to obtain primary data. The literature research is conducted through a review of books, journals and relevant legislation. The field research conducted interviews with respondents and key informants involved in the land acquisition process, specifically in the Bogor Outer Ring Road Toll Road Section III B construction. This research uses qualitative data analysis methods to examine and interpret the findings.

The results of this research indicate that the implementation of the Deliberation for the Determination of Compensation in Land Acquisition for the Bogor Outer Ring Road Toll Road Section III B successfully determined both the form and amount of compensation based on mutual agreement. The process provided entitled parties the opportunity to raise questions, objections, or rejections regarding the compensation amount determined by the appraiser, supported by accountable reasons. Compensation was agreed to be in the form of monetary payment for individually-owned land, and land substitution for land owned by Government Institutions, Foundations, and Waqf. Several challenges were identified in realizing the principles of justice and mutual agreement, particularly the absence of binding legal regulations defining what constitutes "just" and "fair" compensation. Other obstacles included issues related to data inventory, planning, community involvement, and the limitations of information among related parties.

Keywords: *Land Acquisition for Public Interest, Justice, Consensus, Compensation, Deliberation, Toll Road Construction*

---

[1] Author, Undergraduate Student at Departement of Agrarian Law, Bachelor of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[2] Lecture at Departement of Agrarian Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.